

ABSTRAK

Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, banyak terjadi penolakan oleh serikat pekerja karena mereka menganggap bahwa aturan tersebut terlalu memihak kepada pengusaha bukan kepada pekerja/buruh. Selain itu, di pertengahan tahun 2015 juga terdapat banyak sekali perusahaan yang jatuh pailit, sehingga mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap para pekerja/buruh. Ketika suatu perusahaan dinyatakan pailit oleh Pengadilan, maka seketika itu pekerja/buruh akan mengalami PHK. Oleh karena itu, maka debitor pailit harus membayar segala tunggakan upah pekerja/buruh yang belum di bayar baik sebelum putusan pailit dijatuhkan maupun setelah putusan pailit dijatuhkan. Namun sering terjadi perselisihan dalam pemberesan harta pailit mengenai upah dan pesangon atau pun hak-hak lain dari pekerja/buruh. Ketika itu terjadi maka hal pertama yang harus dilihat ialah kedudukan upah dan pesangon atau hak-hak lain dari pekerja/buruh. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 tanggal 11 September 2014, dapat mempertegas kedudukan upah dan pesangon atau hak-hak lainnya dalam hal perusahaan pailit, yaitu: pemenuhan upah harus didahulukan sebelum kreditor separatis, sedangkan pesangon atau hak-hak lain dari pekerja/buruh harus didahulukan sebelum kreditor preferens yang lain dibayar dan sesudah kreditor separatis dibayar. Dan ketika terjadi perselisihan dalam daftar pencocokan piutang, maka pekerja/buruh yang diwakilkan oleh advokat dapat menempuh dengan gugatan prosedur *renvoi*, yaitu gugatan

bantahan terhadap daftar pencocokan piutang yang dikembalikan ke majelis hakim niaga yang menjatuhkan putusan pailit sehingga tidak perlu diadakan gugatan terpisah, dimana hakim pengawas cukup menunjuk pihak-pihak untuk hadir dipersidangan Pengadilan Niaga.

Kata kunci : *renvooi procedure, upah dan pesangon atau hak-hak lain pekerja/buruh.*

